



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Wastukencana No. 17 Telp. 022-4203471, Fax 022-4232541
BANDUNG 40117

Pembinaan terhadap Nelayan pada Wilayah Pengelolaan s.d. 12 Mil



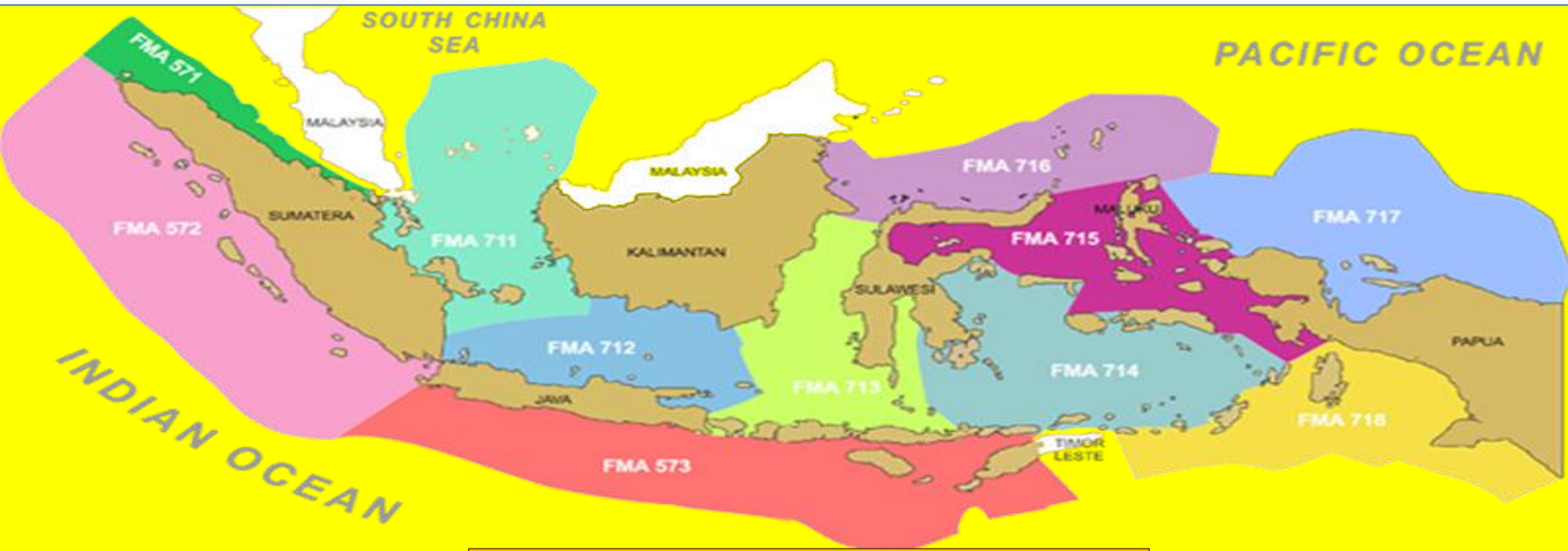
Oleh :
Kabid Perikanan Tangkap, Diskanlaut Prov . Jabar
Disampaikan pada :

**Workshop Adaptasi Perikanan Tangkap terhadap Perubahan dan Variabilitas Iklim di Wilayah Pesisir
Selatan Pulau Jawa Berbasis Kajian Risiko- LPPM ITB
Palabuhanratu, 28 Juni 2016**

1

POTENSI DAN KERAGAAN

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA



11 WPP

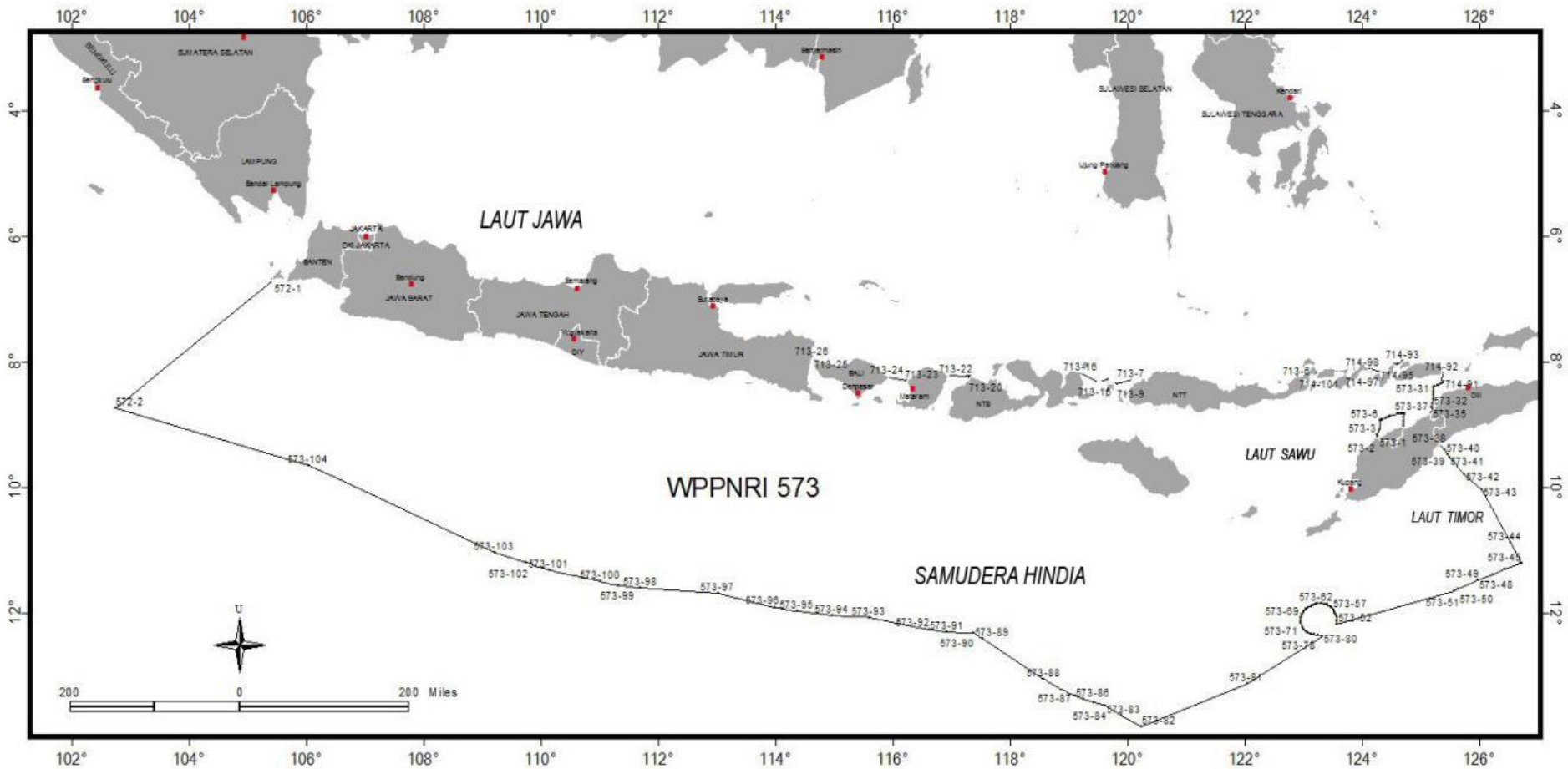
Total Potensi SDI : 7,3 juta ton/tahun *)

Hsl kajian terakhir 9,9 jt Ton

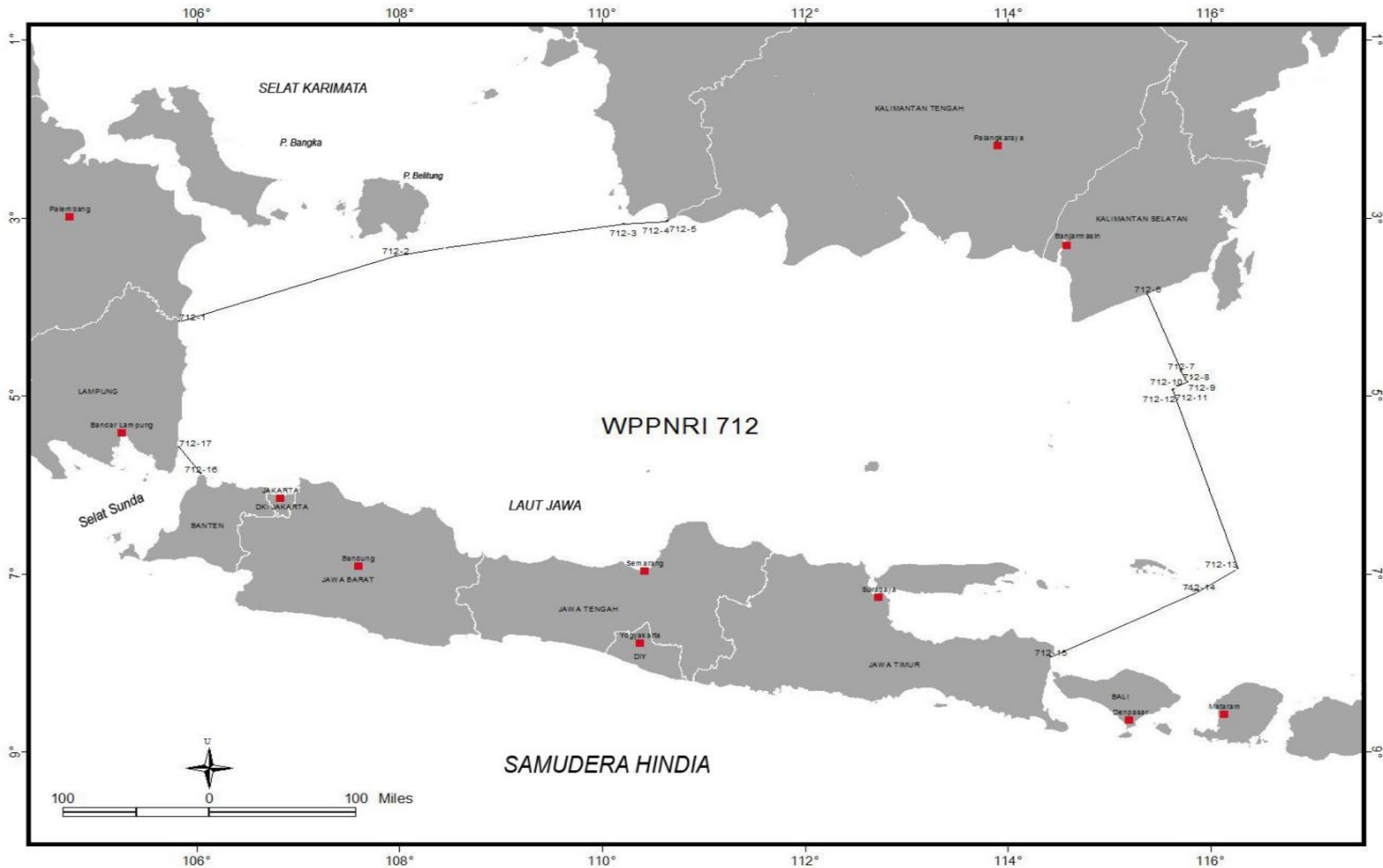
1. Pemenuhan kebutuhan pangan (domestik dan ekspor)
2. Menggerakkan ekonomi daerah (hulu-hilir)
3. Penyedia lapangan kerja
4. Sumber penerimaan negara (pajak, PAD, PNBK)

Harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan

PETA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 573

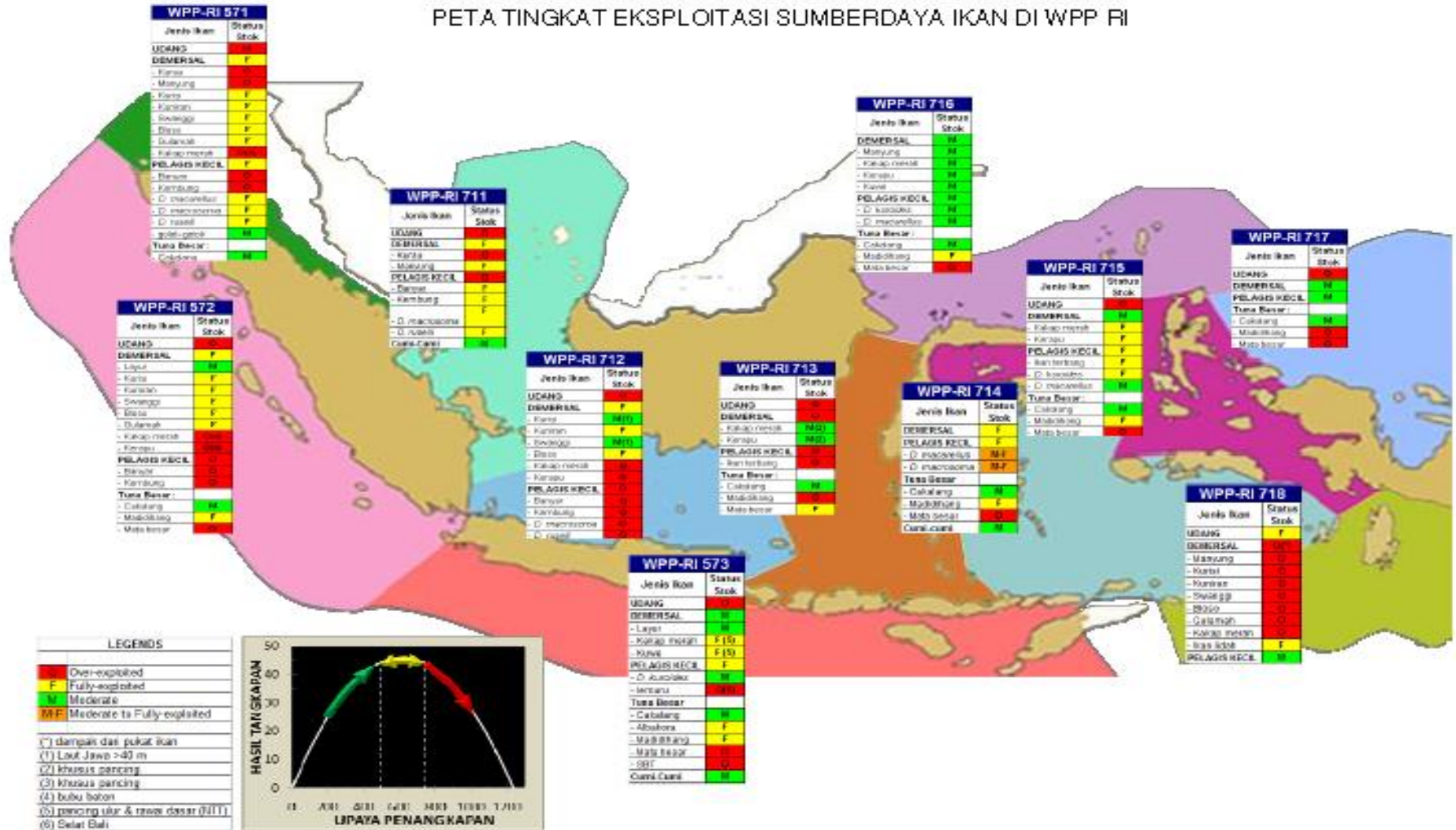


PETA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 712



PETA TINGKAT EKSPLOITASI SUMBERDAYA IKAN DI WPPNRI

PETA TINGKAT EKSPLOITASI SUMBERDAYA IKAN DI WPP RI



Potensi & Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Pantai Selatan - Jawa Barat (WPP NRI-573) Tahun 2014



Panjang Pantai : 416,31 Km

Potensi Prod. : 340.000 Ton/Thn/WPP

Pemanfaatan : 16.680,01 Ton → Kuota..... ?

Karakteristik Pansela : Under Exploited (terutama ZEE), kondisi laut cukup berbahaya (Laut dalam, gelombang tinggi, angin kencang, pantai berka-rang dan curam), potensi ikan masih melimpah, RTP Nelayan masih rendah, intensitas pemanfaatan ruang masih rendah, kualitas air masih baik, ekosistem pantai masih cukup lestari.

Jum.Armada : 4.211 Unit → 90,77% *perahu kecil*

Jenis & Jumlah Alat Tangkap : Pukat kantong (164 Unit), Pukat Cincin (31 Unit), Jaring Insang (3.547 Unit), Jaring Angkat (386 Unit), Pancing (5.937 Unit)& Alat Pengumpul Rmpt Laut (1.105 Unit)

Sebaran SDI : Potensi perikanan tangkap meliputi Yelow Fin, Cakalang, Tongkol, Tenggiri dan Layur

SDM Nelayan : Nelayan penuh (19.856), nelayan sambilan utama (3.147) dan nelayan sambilan tambahan (2.871)

UPTD : BP3WS

Potensi, Karakteristik & Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Pantai Utara - Jawa Barat (WPP NRJ-712) Tahun 2014



Panjang Pantai : **426,35** Km

Potensi
Produksi : 1.009.700 Ton/Tahun/WPP

Pemanfaatan : 187.087,41,68 → (Kuota.....**Overfishing ?**)



Karakteristik
Pantura : Over Capacity, Tingginya Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir (Pemukiman dan Industri), Rusaknya Ekosistem Pantai (Menyusutnya Hutan Mangrove, Abrasi Pantai), Kejenuhan Lapangan Kerja di Bidang Penangkapan Ikan → **SDI Menurun**



Jum.Armada : 18.187 Unit → 67,06% **didominasi perahu kecil**

Jenis & Jumlah
Alat Tangkap : Pukat kantong (5.836 Unit), Pukat Cincin (325 Unit), Jaring Insang (9.632 Unit), Jaring Angkat (101 Unit), Pancing (590 Unit), Perangkap (3.034 Unit), Alat Pengumpul Kerang (225 Unit)



Sebaran SDI : Dominasi oleh ikan tongkol krai, tenggiri, kembung, dan peperek

SDM Nelayan : Nelayan penuh (54.955), nelayan sambilan utama (14.706) dan nelayan sambilan tambahan (8.985)

UPTD : BP3WU

**JUMLAH NELAYAN, KUB, KAPAL, ALAT TANGKAP DAN PRODUKSI
PERIKANAN LAUT JAWA BARAT TAHUN 2014**

NO	KABUPATEN/KOTA	NELAYAN	KUB	KAPAL (UNIT)	API (UNIT)	PRODUKSI (TON)
1	Kab. Sukabumi	10.328	113	2.490	2.777	10,624.77
2	Kab. Cianjur	1.319	105	171	532	111.58
3	Kab. Garut	3.623	28	486	6.760	3,949.44
4	Kab. Tasikmalaya	3.604	53	310	347	861.17
5	Kab. Pangandaran	7.000	151	754	754	1,133.05
6	Kota Cirebon	1.656	22	312	350	4,066.84
7	Kab. Cirebon	22.749	163	4.629	6.819	27,139.46
8	Kab. Indramayu	40.545	263	6.057	9.130	126,783.86
9	Kab. Subang	5.414	37	731	731	18,912.03
10	Kab. Karawang	6.209	68	1.520	1.545	8.580.93
11	Kab. Bekasi	2.073	75	727	1.168	1,604.29
JUMLAH		104.520	1.078	18.187	30.913	203,467,42

KERAGAAN PELABUHAN PERIKANAN DI JAWA BARAT

No	Kab/Kota	PPN	PPP	PPI	Total	Kondisi
1	Kota Cirebon	1	0	3	4	PPP dan PPI Belum Sepenuhnya Memenuhi Kriteria Operasional Pelabuhan Perikanan yang Ditetapkan
2	Cirebon	0	1	16	17	
3	Indramayu	0	1	12	13	
4	Subang	0	2	6	8	
5	Karawang	0	1	11	12	
6	Bekasi	0	0	4	4	
7	Sukabumi	1	0	7	8	
8	Cianjur	0	0	3	3	
9	Garut	0	1	4	5	
10	Tasikmalaya	0	0	2	2	
11	Pangandaran	0	0	8	8	
	Jumlah	2	6	76	84	

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JAWA BARAT 2013-2018

KEMANDIRIAN PANGAN

- Kelembagaan
- Tata ruang dan zonasi
- Kemiskinan
- Pengangguran
- Infrastruktur
- Rendahnya input produksi
- Degradasi mutu dan lingkungan
- Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan pantai utara dan pansela
- Dikembangkannya pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Palabuhanratu, Rancabuaya, dan Pangandaran.

DAYA SAING

- Pengendalian mutu
- Standarisasi mutu (*food safety and quality*)
- Investasi dan permodalan
- Ketelusuran dan keberlanjutan produk
- Kurangnya penguasaan pasar
- Sarana dan Prasarana
- Sebagian nelayan masih tradisional
- Struktur armada 90% masih tradisional

KELESTARIAN SDA & LH

- Eksploitasi sumberdaya
- Pencemaran, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan
- Pengawasan dan Pengendalian SDA
- Teknologi ramah lingkungan
- Pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Kegiatan sektor lain

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP JAWA BARAT

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap seperti : fasilitas pelabuhan, rekayasa teknologi alat tangkap dan terbatasnya kapasitas armada penangkapan;
- Pelaksanaan pembangunan masih bersifat parsial, dan belum sinergi sehingga manfaat bagi masyarakat belum optimal;
- Rendahnya penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia (nelayan dan petugas);
- Terbatas dan semakin jauhnya fishing ground akibat semakin rusaknya ekosistem pantai dan maraknya illegal fishing;
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan nelayan;
- Terbatasnya akses permodalan bagi usaha perikanan tangkap;
- Masih banyaknya armada perikanan tangkap tidak berizin; dan
- Masih banyak penggunaan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan

PERMASALAHAN NELAYAN



2

Faktor Alam dan Sumberdaya Ikan : Usaha nelayan sangat dipengaruhi faktor alam: seperti musim, perubahan iklim dan cuaca, serta daerah Penangkapan semakin jauh, akibat tekanan SDI di perairan pantai

3

Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya : 1) tingkat pendidikan rendah, 2) Permasalahan gizi, 3) Sanitasi dan lingkungan tidak layak, 4) Keterbatasan informasi,



2

KEBIJAKAN dan PROGRAM/ KEGIATAN



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 	

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ... (lanjutan)

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.		
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>; 	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

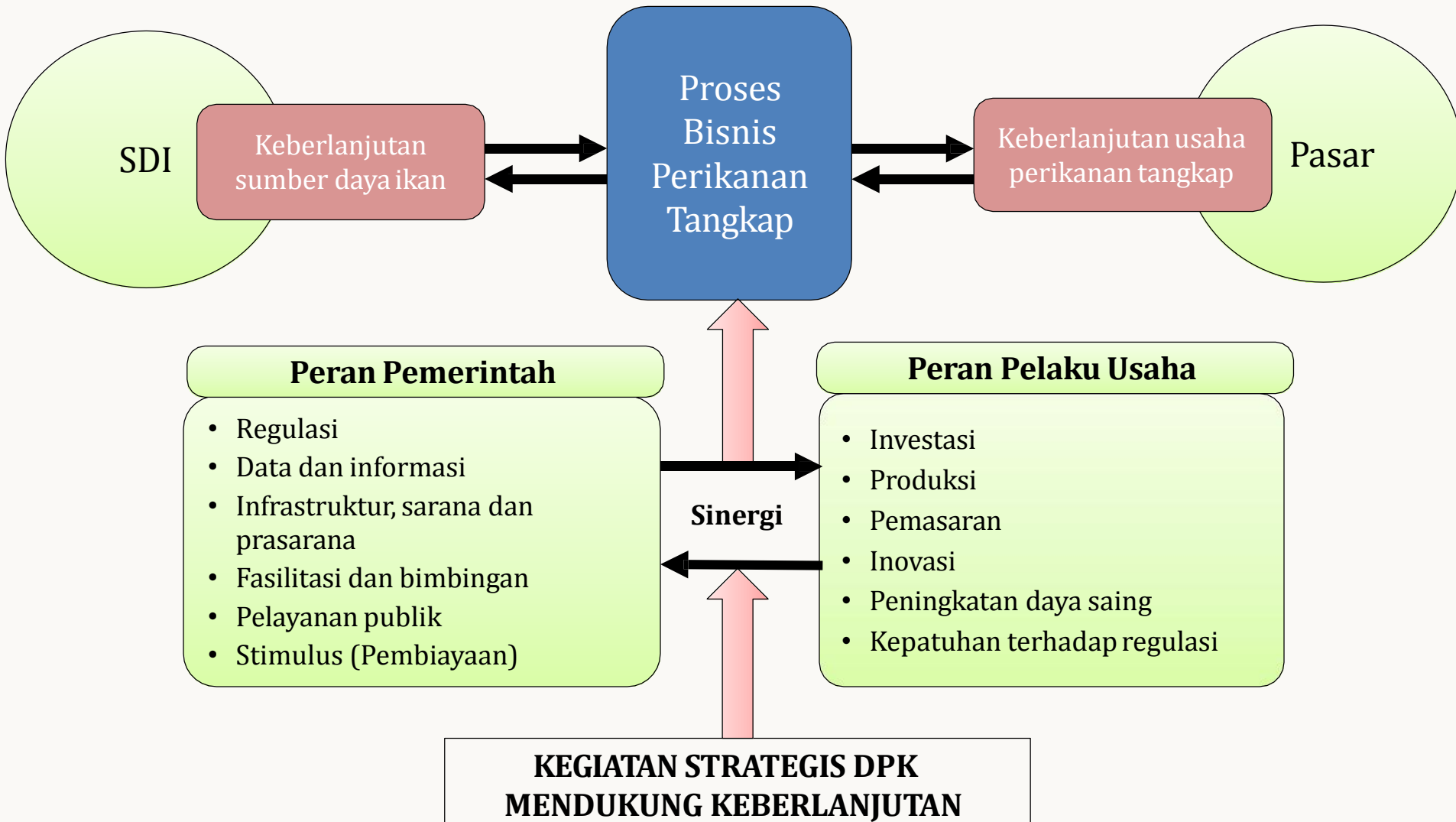
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ... (lanjutan)

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>dan</p> <p>b. di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</p> <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal</p>	<p>kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>	

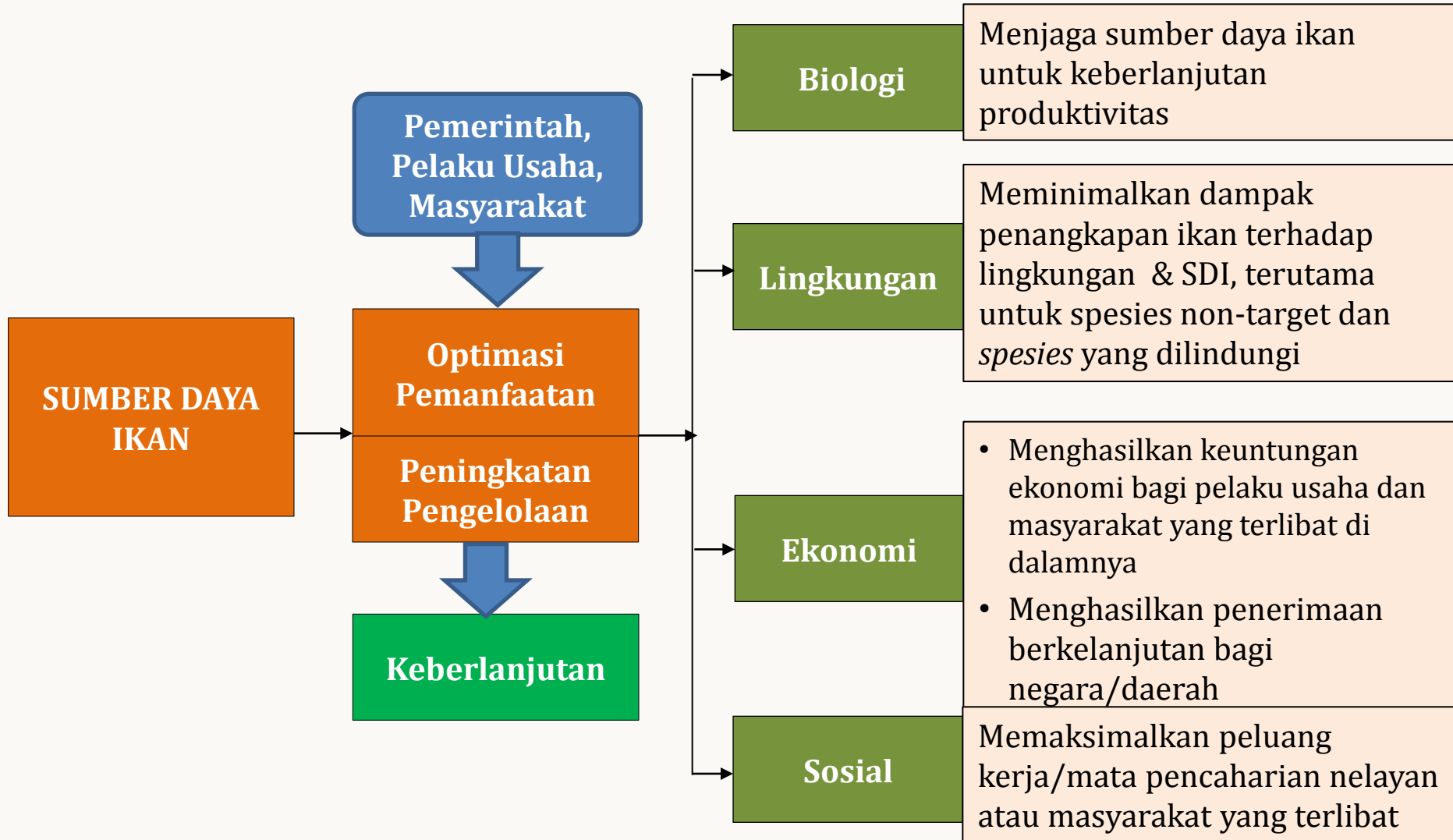
Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Mendukung Keberlanjutan Perikanan Tangkap

HULU

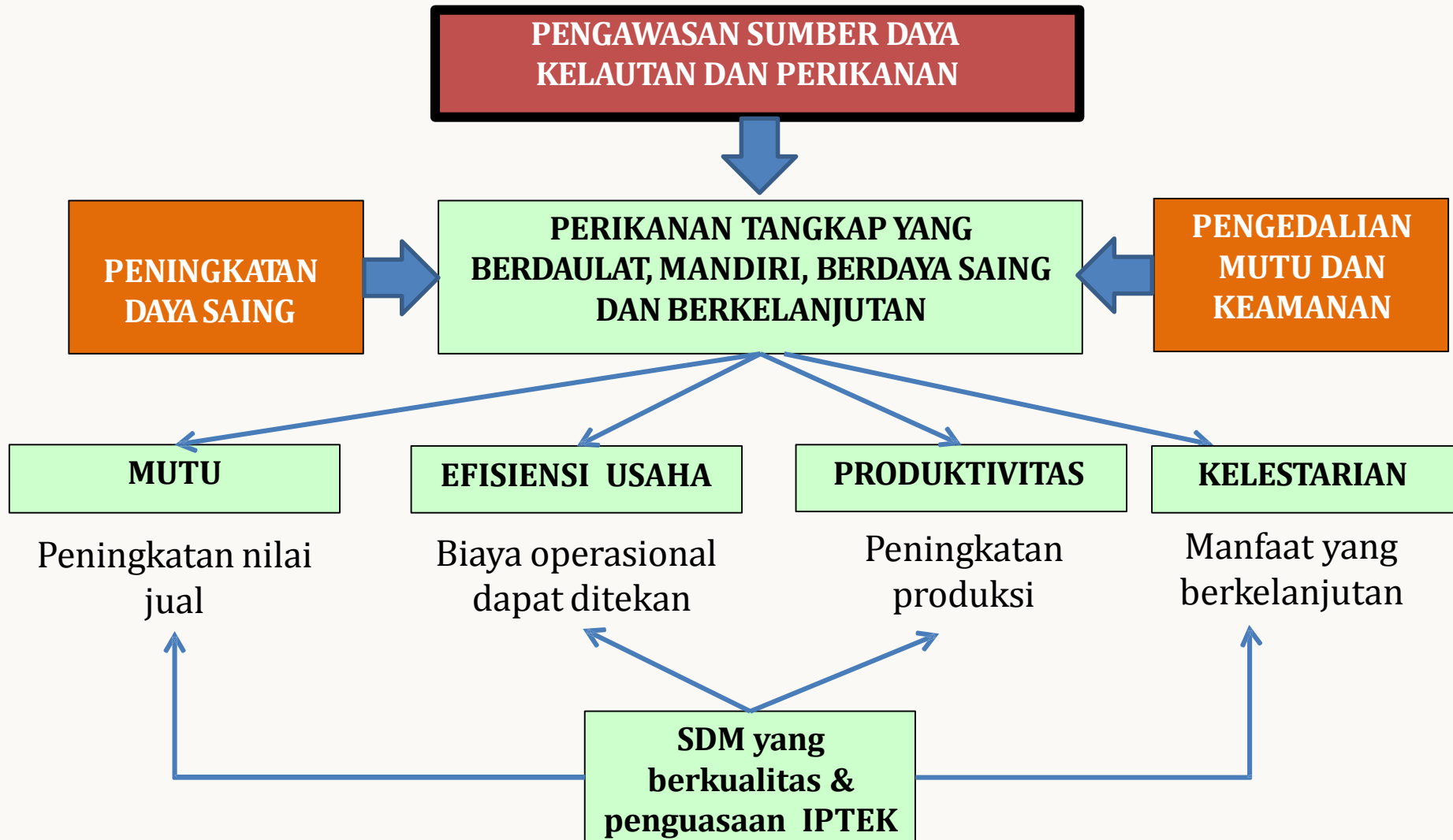
HILIR



PRINSIP KEBERLANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP



Sinergi dalam Membangun Perikanan Tangkap



PROGRAM & KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM

KEGIATAN

**PROGRAM
PENGEMB.
DAN
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP**

**MENDUKUNG
KEBERLANJUTAN
SUMBER DAYA IKAN**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

**PENGENDALIAN PENANGKAPAN
IKAN**

**MENDUKUNG
KEBERLANJUTAN
USAHA PERIKANAN
TANGKAP**

**PENGELOLAAN KAPAL PERIKANAN,
ALAT PENANGKAP IKAN DAN
SERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN**

**PENGELOLAAN PELABUHAN
PERIKANAN**

PENGELOLAAN KENELAYANAN

FOKUS KEGIATAN

1. Pengelolaan SDI

- a. Dukungan penanggulangan *IUU Fishing*, terutama *Unreported fishing* melalui pelaporan data SDI (*logbook*, statistik perikanan tangkap)
- b. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan SDI
- c. Pemulihan SDI melalui pembangunan rumah ikan dan restocking

2. Pengendalian Penangkapan Ikan

- a. Perbaiki sistem perizinan penangkapan ikan serta peningkatan pelayanan perizinan (on line, e-services, DSS, gerai, dll)
- b. Pelayanan migrasi izin kapal daerah yang melakukan *markdown* ke pusat
- d. Integrasi perizinan pusat-daerah

FOKUS KEGIATAN

- 3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan**
 - a. Pembangunan kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan**
 - b. Pengadaan alat penangkap ikan yang produktif dan ramah lingkungan; Pengalihan cantrang , dogol, dll (Permen KP No. 02 Tahun 2015) ke alat tangkap ramah lingkungan**
 - c. Penerapan aplikasi sistem pendaftaran kapal perikanan online**
 - e. Sertifikasi awak kapal perikanan (BST, Ankapin & Atkapin)**

4. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

- a. Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan pelabuhan perikanan
- b. Kelembagaan dan penetapan kelas pelabuhan perikanan serta Penyusunan dan Penetapan WKOPP
- c. Penerapan standar pelayanan di pelabuhan perikanan
- d. Penerapan CPIB & SHTI
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan
- f. Peningkatan konektivitas antar pelabuhan perikanan

5. Pengelolaan Kenelayanan

- a. Percepatan Kartu Nelayan dan penguatan kelembagaan melalui penumbuhan KUB menjadi koperasi perikanan
- b. Peningkatan akses permodalan
- c. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
- d. Ketahanan/ Perlindungan Nelayan



3

PEMBINAAN terhadap NELAYAN



NELAYAN

(UU Nomor 7 Tahun 2016)

Nelayan Kecil	Nelayan Tradisional	Nelayan Buruh	Nelayan Pemilik
Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10(GT	Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal	Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan	Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan

JUMLAH NELAYAN

Statistik Perikanan Tangkap
Tahun 2014
(104.520 orang)



Sinkronisasi

1. Nelayan Penuh (74.811)
2. Nelayan Sambilan Utama (17.853)
3. Nelayan Sambilan Tambahan (11.856)

KARTU NELAYAN

45.912 Orang (Per 24 Juni 2016)= 43,93 %

DEFINISI

- **Perlindungan** Nelayan, adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan
- **Pemberdayaan** Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, melaksanakan Usaha secara lebih baik.

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum

STRATEGI

Perlindungan

Pemberdayaan

➤ Penyediaan prasarana Usaha Perikanan

➤ Pendidikan dan pelatihan

➤ Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan

➤ Penyuluhan dan pendampingan

➤ Jaminan kepastian usaha

➤ Kemitraan usaha

➤ Jaminan risiko Penangkapan Ikan,

➤ Kemudahan akses ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan informasi

➤ Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi

➤ Penguatan kelembagaan

➤ Pengendalian impor Komoditas Perikanan

➤ Jaminan keamanan dan keselamatan

➤ Fasilitasi dan bantuan hukum

SeHAT Nelayan

Terbit Sertipikat 2009 s.d. 2015	Target 2016 s.d. 2019	Jumlah
6.534	4.300	10.834
Pasca SeHAT		
Orang/Sertipikat	Nilai (Rp.)	
419	9.517.500.000,-	

Penumbuhan Koperasi Nelayan

Koperasi

Jumlah

Lama

45

Baru

39

Dalam Proses

30

Jumlah

114

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

➤ **Pendanaan bersumber dari:**

- APBN ,
- APBD, dan/atau
- dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

➤ **Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:**

- lembaga perbankan;
- lembaga pembiayaan; dan/atau
- Lembaga penjaminan



Review Peran **BANTUAN PEMERINTAH**



DJ PERIKANAN TANGKAP

- Pengendalian pelaksanaan (tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran)
- Pembinaan Teknis: sosialisasi, bimbingan teknis, dll



DPK PROVINSI

Pembinaan administratif: mengkoordinasikan Kab./Kota
Fasilitasi percepatan penyelesaian dokumen kapal
Percepatan proses perizinan [UU 23 tahun 2014]



DKP KAB/KOTA

Memantau kinerja Penerima Bantuan
Melaporkan kinerja Penerima Bantuan dan kapal
perikanan setiap 3 bulan, kepada DIRJEN
Membina Penerima Bantuan
Tertib pengelolaan Bantuan Pemerintah

TERIMA KASIH, Hatur Nuhun.....

